



Biro Adm. Pembangunan Daerah  
Setda Provinsi Jawa Tengah

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

**BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH**



kunjungi kami :

instagram : @bangda\_jateng  
website : bangda.jatengprov.go.id  
youtube : BiroAdmBangdaProvJateng

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	1
1.3 Isu-Isu Strategis	7
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	7
1.5 Sistematika Penulisan	11
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2023	17
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	40
3.3 Inovasi	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	44
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Mandat Kinerja	4
Tabel 1.2 : Daftar Kepangkatan Pegawai	8
Tabel 1.3 : Tingkat Pendidikan Pegawai	9
Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana	10
Tabel 1.5 : Anggaran Tahun 2023	10
Tabel 1.6 : Tindak Lanjut LHE SAKIP	12
Tabel 2.1 : RPJMD 2018-2023	14
Tabel 2.2 : Renja 2023	16
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja 2023	17
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan	18
Tabel 3.1 : Interval Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Program Utama	21
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Program Penunjang	22
Tabel 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA 2023	23
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2023 dan Tahun sebelumnya	24
Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2023 dan Target Tahun 2023	26
Tabel 3.7 : Analisis Penyebab Keberhasilan	27
Tabel 3.8 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.9 : Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	33
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran	40

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis	6
Gambar 1.2 : Bagan Organisasi	6
Gambar 1.3 : Profil Pegawai	8
Gambar 2.1 : SSO Provinsi Jawa Tengah	19
Gambar 2.2 : Tatapraja	19



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Organisasi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2024

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 1199603 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Administrasi Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c) Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan disusun.

### **1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, maka dilakukan penyalarsan kinerja dan target kinerja secara vertikal

dari level unit lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah yang dituangkan dalam dokumen cascading Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah serta rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dituangkan dalam dokumen peta proses bisnis Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

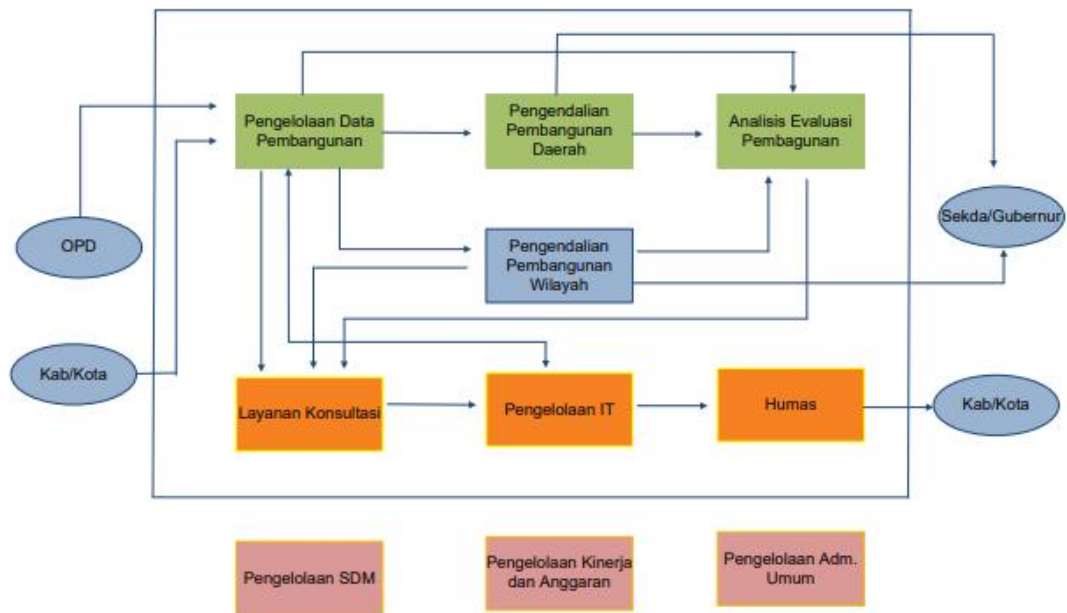


**Tabel 1.1**  
Mandat Kinerja  
Cascading Biro Adm. Bangda 2023

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan APBD	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I
			Capaian Pelaksanaan APBN		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	
					Jumlah Rekomendasi	Jumlah Dokumen Hasil	
			Persentase realisasi bantuan keuangan				

					Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III		Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III
			Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda

**Gambar 1.1**  
Peta Proses Bisnis  
Biro Administrasi Pembangunan  
Daerah



Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
Bagan Organisasi  
Biro Administrasi Pembangunan Daerah  
(Pergub Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021)



### **1.3 Isu-isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2023, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi yaitu:

1. Beberapa SKPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) masih belum optimal sehingga pada saat pelaksanaannya kurang dipedomani oleh SKPD sebagai pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tidak bisa segera dilaksanakan karena terkendala pada tahap pemenuhan dokumen persyaratan pencairan bantuan keuangan.
3. Beberapa SKPD maupun Kab/Kota sebagai pelaksana kegiatan belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, lengkap dan informatif.
4. Masih tingginya sasaran intervensi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga diperlukan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi sumber daya yang ada.

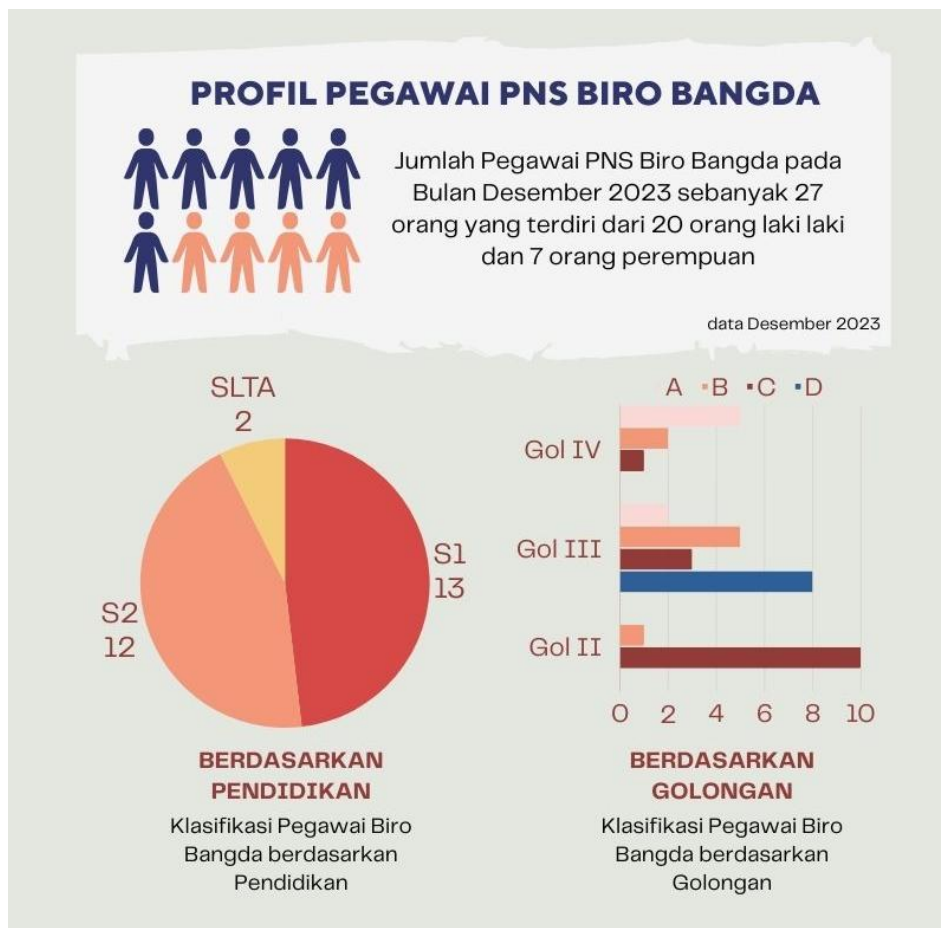
### **1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Pada bulan Desember Tahun 2023, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah berjumlah 27 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon



II), 2 orang Analis Kebijakan Ahli Madya, 4 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 orang Perencana Muda, 1 orang Arsiparis Pertama, 1 orang Kasubbag TU (eselon IV) dan 17 orang Jabatan Fungsional Umum.

**Gambar 1.3**  
**Profil Pegawai**  
**Biro Administrasi Pembangunan Daerah**



**Tabel 1.2**  
**Daftar Kepangkatan Pegawai**  
**Biro Administrasi Pembangunan Daerah**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang
3	Pembina (IV/a)	5 Orang

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
4	Penata Tk. I (III/d)	8 Orang
5	Penata (III/c)	3 Orang
6	Penata Md Tk. I (III/b)	5 Orang
7	Penata Muda (III/a)	2 Orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 Orang
<b>Total</b>		<b>27 Orang</b>

**Tabel 1.3**  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana Strata 2	13 Orang
2	Sarjana Strata 1	12 Orang
3	SLTA/ sederajat	2 Orang
<b>Total</b>		<b>27 Orang</b>

Selain itu, disamping adanya dukungan dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa juga didukung oleh bantuan tenaga non PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa didukung dengan adanya beberapa fasilitas sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
Sarana dan Prasarana  
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Ruang Rapat	3 Ruang	9	LCD Screen	3 Unit
2	Mesin Komputer	39 Unit	10	Mesin Penghancur Kertas	3 Unit
3	Printer	20 Unit	11	Mesin Fotokopi	1 Unit
4	Laptop	12 Unit	12	Meja	35 Unit
5	Mesin telepon/fax	1 Unit	13	Kursi	65 Unit
6	Mesin Ketik	1 Unit	14	Filling Kabinet	20 Unit
7	LCD	5 Unit	15	Mobil Dinas	8 Unit
8	TV	2 Unit	16	Motor Dinas	5 Unit

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2023, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Kebijakan Administrasi Pembangunan serta Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp 3.803.006.000,-.

**Tabel 1.5**  
Anggaran Tahun 2023  
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 3.117.200.000,-
2	Administrasi Umum	Rp 685.806.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3.803.006.000,-</b>

## 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

### 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 khusus pada lingkup Biro-Biro Setda Provinsi Jawa Tengah dikompilasi dalam dokumen LKjIP Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

**Tabel 1.6**

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	-	-

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

##### **1. Visi Misi**

Adapun visi Provinsi Jawa Tengah adalah : "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan ke dalam 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut: membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru; menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Maka, melalui Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan "Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

##### **2. Tujuan dan Sasaran**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**RPJMD 2018-2023**  
**Biro Administrasi Pembangunan Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	<b>Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah</b>		Persentase kebijakan yang efektif	80	81	82	83	84	
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	80	81	82	83	84	
	<b>Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah</b>		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	85	85	85	85	
		<b>Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>		Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	82	83	84	85
				Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	82	83	84	85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	81	82	83	84
			Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	85	85	85	85	85

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator maupun target dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
RENJA 2023  
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET (2023)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan APBD	%	98,5
				Capaian pelaksanaan APBN	%	95,5
				Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85
				Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah	%	85
				Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi	%	100
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Program Administrasi Umum	Presentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berikut tabel perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta tabel Program dan Kegiatan Tahun 2023:

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	1. Capaian pelaksanaan APBD	%	98,5
		2. Capaian pelaksanaan APBN	%	95,5
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	1. Presentase realisasi bantuan keuangan	%	85
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	1. Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85
		2. Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100
4	Meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	1. Presentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	100

**Tabel 2.4**  
Program dan Kegiatan

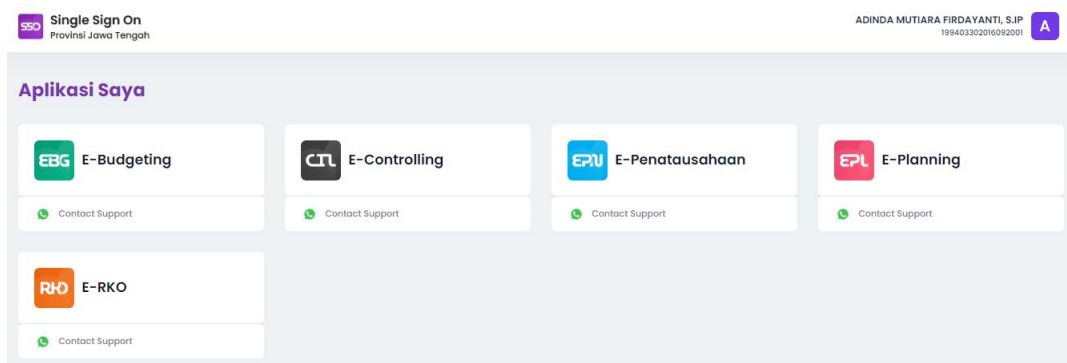
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	ANGGARAN
1	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan APBD	98,5	Rp 750.700.000
		Capaian pelaksanaan APBN	95,5	Rp 423.500.000
		Presentase realisasi bantuan keuangan	85	Rp 997.000.000
		Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah	85	Rp 799.000.000
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi	100	Rp 147.000.000
2.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100	Rp 410.806.000
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	Rp 275.000.000

## 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Penerapan e-Government bertujuan untuk mempersingkat proses kerja birokrasi Pemerintah dan memungkinkan adanya transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Maka untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Biro Administrasi

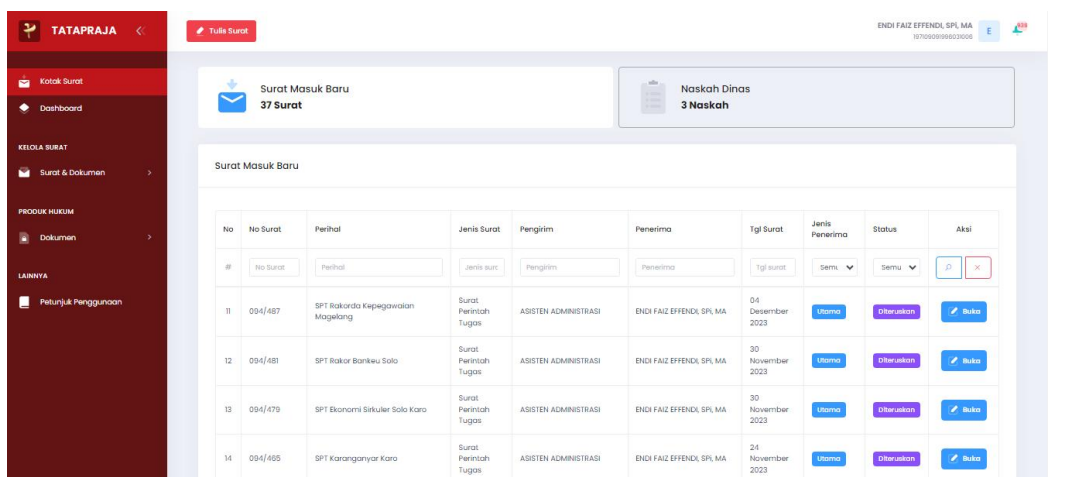
Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah didukung oleh *Government Resources Management System* (GRMS) yang memuat beberapa aplikasi antara lain e-budgeting, e-planning, e-RKO, e-penatausahaan, e-delivery dan e-controlling yang mendukung seluruh proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

**Gambar 2.1**  
Tampilan Single Sign On  
Provinsi Jawa Tengah



Disamping itu, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan administrasi persuratan yang baik sebagai sarana komunikasi dalam kedinasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah didukung aplikasi tatapraja yang dilengkapi dengan berbagai fitur naskah dinas sampai dengan tanda tangan elektronik.

**Gambar 2.2**  
Tampilan Tatapraja





## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2023, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	> 100%	Sangat Baik
2.	85 – 100%	Baik
3.	65– 84,99%	Cukup
4.	50 – 64,99%	Kurang
5.	< 50,%	Sangat Kurang

Sesuai Renja Tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan utama yaitu **“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki satu sasaran utama yaitu meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut tabel capaian kinerja Tahun 2023:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Program Utama**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALI-SASI	%	
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian pelaksanaan APBD	%	98,5	99,45	100,96	98,5
		Capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	93,32	104	95,5
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase realisasi bantuan keuangan	%	85	96,07	113,02	85
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85	85	100	85
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100	100	100

Adapun tujuan penunjang yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah”**. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat dua sasaran yaitu meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Berikut tabel capaian kinerja Tahun 2023:

**Tabel 3.3**  
Capaian Kinerja Program Penunjang  
Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALI -SASI	%	
1	Meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	100	100	100

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	98,5	99,45	100,96	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
		Capaian Pelaksanaan APBN	95,5	99,32	104	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	85	96,07	113,02	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	85	85	100	BAIK	e-controlling kinerja
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja
4	Meningkatnya kualitas administrasi	Presentase Capaian Administrasi	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
	umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah					
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah rata-rata realisasi capaiannya dikategorikan **BAIK**.

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	<b>NA</b>								98	99,09	101,11	98,5	99,45	100,96	
		Capaian Pelaksanaan APBN									95	98,99	104,2	99,32	95,5	104	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangu-	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan									83	99,57	119,96	85	96,07	113,02	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	nan Wilayah																
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Daerah									80	92	115	85	85	100	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang Direalisasi									100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah									100	100	100	100	100	100	
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda									100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, target maupun realisasi pada tahun di bawah tahun 2022 tidak bisa disandingkan karena indikator kinerja pada Tahun 2022 dan 2023 merupakan indikator baru berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan  
Target Akhir RPJMD

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian pelaksanaan APBD	99,45	98,5	100,96
		Capaian pelaksanaan APBN	99,32	95,50	104
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase realisasi bantuan keuangan	96,07	85	113,02
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah	85	85	100
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi	100	100	100
4	Meningkatnya kualitas administrasi	Presentase capaian	100	100	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	administrasi umum dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tingkat capaiannya lebih dari 100%.

**Tabel 3.7**  
Analisis Penyebab Keberhasilan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	98,5	99,45	100,96	Pengendalian pelaksanaan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) secara cermat dengan mempertimbangkan jadwal, kebutuhan anggaran, tahapan pelaksanaan,	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						menajemen resiko yang menjadi kendala/hambatan. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala/sewaktu-waktu untuk penyusunan analisis dan kebijakan	
		Capaian Pelaksanaan APBN	95,5	99,32	104	Penyusunan data rencana kegiatan APBN, berkoordinasi mengenai pengendalian pelaksanaan kegiatan APBN (bila sewaktu-waktu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBN dilanjutkan dengan pengendalian dilakukan secara langsung (kunjungan lapangan pada kegiatan strategis), tidak langsung (melalui pelaporan bulanan) untuk penyusunan analisis dan kebijakan	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan	Presentase Realisasi	85	96,07	113,02	1. Ketepatan waktu penyampaian DPA	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	administrasi pembangunan Wilayah	Bantuan Keuangan				Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2. Menyelenggarakan rakor untuk mendorong bantuan keuangan yang tidak dapat dilaksanakan (permasalahan antara lain: tidak sesuai kewenangan, double anggaran dengan DAK) untuk bisa dialihkan ke bantuan keuangan lainnya pada anggaran perubahan	
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	85	85	100		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di	100	100	100		

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
		Realisasi					
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100		
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain, pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD, APBN maupun bantuan keuangan serta pengendalian terhadap pelaporan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan.

**Tabel 3.8**  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Capaian Pelaksanaan APBD	98,5	99,45	100,96	Rp 750.700.000	Rp 750.403.390	99,96	0,04
2	Capaian Pelaksanaan APBN	95,5	99,32	104	Rp 423.500.000	Rp 422.803.920	99,84	0,16
3	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	85	96,07	113,02	Rp 997.000.000	Rp 996.827.500	99,98	0,16
4	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	85	85	100	Rp 799.000.000	Rp 797.645.100	99,83	0,17
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	100	100	Rp 147.000.000	Rp 146.498.160	99,66	0,34

NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
6	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100	Rp 410.806.000	Rp 410.447.576	99,91	0,08
7	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100	Rp 275.000.000	Rp 273.624.874	99,50	0,50

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 7 (tujuh) indikator program pada tahun 2023 sebesar Rp.3.798.250.520,- (99,87%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,13%.

**Tabel 3.9**  
**Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian**  
**Pernyataan Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah	95,44	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan APBD	99,45	Menunjang
					Capaian pelaksanaan APBN	99,32	Menunjang
					Presentase realisasi bantuan keuangan	96,07	Menunjang
					Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah	85	Menunjang
					Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi	100	Menunjang
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	88,5	Administrasi Umum	Presentase capaian administrasi	100	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			umum dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja didukung oleh 2 (dua) program dengan 7 (tujuh) indikator kinerja program. Adapun 7 (tujuh) indikator kinerja program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

#### **A. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program yang didukung oleh kegiatan pengendalian administrasi pembangunan Daerah, yang kemudian lebih spesifik didukung oleh pelaksanaan pada level sub kegiatannya yaitu indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBD, capaian pelaksanaan APBN dan persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pembangunan wilayahnya dalam kategori baik.

**Indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBD** diformulasikan dari realisasi fisik pelaksanaan APBD oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan APBD. Fungsi pengendalian APBD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Pada tahap perencanaan pada TA 2023 dilaksanakan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja operasional melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dan verifikasi RKO terhadap 49 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengendalian terhadap progres realisasi fisik terhadap ketercapaian target yang telah dibuat. Pengendalian dilaksanakan dalam bentuk rakor APBD yang dilaksanakan triwulanan, monitoring dan evaluasi berkala maupun sewaktu-waktu serta penerbitan rekomendasi kebijakan dalam bentuk SE untuk mendukung percepatan pelaksanaan APBD TA 2023.

Adapun evaluasi terhadap belanja Daerah TA 2023 dari total Anggaran 27,482 triliun rupiah telah terealisasi 25,792 triliun rupiah (93,85%) dengan capaian fisik sebesar 99,45%. Dari persentase realisasi keuangan belanja daerah tersebut terdapat 11 SKPD yang realisasinya dibawah rata-rata Provinsi yaitu: Dinas Nakertrans 93,73%, Dinas Dikbud 93,69%, BPSDMD 92,98%, BPKAD 92,72%, Bapenda 90,75%, RSJD Dr. RM Soedjarwadi 90,74%, Dinas LHK 87,96%, Biro Perekonomian 85,13%, RSJD Amino 83,37%, RSJD Surakarta 80,97%, RSUD Tugurejo 77,03%.

Sedangkan terkait capaian fisik, terdapat SKPD yang tidak selesai dan /atau tidak terlaksana kegiatannya, diantaranya: RSUD Tugurejo 89,78%, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 95,37%, Dinas PUSDATARU 98,79%, RSUD Dr. Moewardi 99,91%, Dinas Dikbud 99,95%. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: gagal tender, kinerja penyedia barang/jasa kurang optimal, persyaratan pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi, sasaran penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan serta pengadaan barang tidak memenuhi syarat TKDN.

**Indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBN** diformulasikan dari rata-rata realisasi fisik DAK dan Dekon TP. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan APBN. Fungsi pengendalian APBN dilaksanakan melalui



pelaksanaan rapat teknis pengendalian DAK Provinsi Jawa Tengah TA 2023 secara semesteran dan fasilitasi desk rekonsiliasi data progress pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN guna menginventarisir adanya potensi pelaksanaan kegiatan yang terlambat serta merekomendasikan langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaksana kegiatan.

Adapun evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kegiatan APBN Provinsi Jawa Tengah TA 2023, sebagai berikut:

- a. DAK fisik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.424,651 Miliar dikelola oleh 8 SKPD, terealisasi Rp.402,028 Miliar (94,67%), realisasi fisik 99,54%. Terdapat 2 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan (97,75%) dan Dinas Pusdataru (92,62%).
- b. DAK non fisik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.3,317 Triliun dikelola oleh 5 SKPD, terealisasi Rp.3,280 Triliun (98,91%) realisasi fisik 100%.
- c. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 104,643 Miliar,- dikelola oleh 13 SKPD, terealisasi Rp.100,796 Miliar (96,32%), realisasi fisik 99,87%. Terdapat 1 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas LUTKAN (96,64%).
- d. Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 307,224 Miliar,- dikelola oleh 7 SKPD, terealisasi Rp.300,217 Miliar (97,72%), realisasi fisik 99,89%. Terdapat 1 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan (99,63%).
- e. Dana Desa sebesar Rp. 8,060 Triliun,- diampu oleh Dinas Permadesdukcapil dan dikelola oleh 29 Kabupaten, tersalur sebesar Rp.6,772 T (84,01%).

**Indikator kinerja program persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pembangunan wilayahnya dalam kategori baik** diformulasikan dari realisasi fisik bantuan keuangan 35 Kab/Kota. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan Wilayah. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa

Tengah pada TA. 2023 sebesar Rp 2.909.745.850.000,- yang terdiri atas Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 703.165.750.000,- dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 2.206.580.100.000,- .

Pada tahun 2023 penyampaian DPA Bankeu Kab/Kota dan Bankeu Pemdes dilaksanakan serentak oleh BPKAD pada awal tahun 2023 sehingga proses pelaksanaan kegiatan bisa dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, dari total 567 kegiatan masih dijumpai beberapa kendala yang mengakibatkan sejumlah 24 kegiatan (19 kegiatan pada APBD murni yang dialihkan pada kegiatan lain pada APBD Perubahan dan 5 kegiatan baru pada APBD Perubahan) tidak dapat dilaksanakan. Kendala tersebut yaitu kegiatan tidak sesuai kewenangan (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang masuk pada Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota), permasalahan aset tanah, dobel anggaran dengan alokasi anggaran DAK (Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan) serta keterbatasan sisa waktu pelaksanaan kegiatan (kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan TA. 2023).

Pada pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 diperoleh rata-rata sebagai berikut:

- a. Capaian Keuangan sebesar Rp 653.134.590.053,- atau sebesar 92,88%
- b. Capaian Fisik kegiatan sebesar 99,31%
- c. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang capaian fisiknya tidak mencapai 100%, yaitu Kabupaten Kendal karena adanya paket pekerjaan yang gagal lelang, Kabupaten Klaten, Purworejo dan Kota Tegal karena tidak cukup waktu pelaksanaan, serta Kabupaten Rembang karena dobel anggaran dengan alokasi anggaran APBD Kabupaten Rembang.

## **B. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis

pelaksanaan pembangunan Daerah serta persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah dengan ketercapaian realisasi kedua indikator 100% dari target

**Indikator kinerja program persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah** diimplementasikan kedalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sub kegiatan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD oleh OPD Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi *e-Controlling* APBD serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja bantuan keuangan pemerintah desa melalui aplikasi Pak Bejo. Hasil dari evaluasi berupa laporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 12 Dokumen.

Sub kegiatan analisis capaian kinerja pembangunan Daerah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkala triwulanan melalui aplikasi *e-Controlling* Kinerja. Hasil dari evaluasi berupa laporan triwulanan capaian kinerja Daerah dan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen.

**Indikator kinerja program persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi** didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Fasilitasi berupa konsultasi dan koordinasi terkait isu strategis pembangunan Daerah yang kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan. Pada tahun 2023 fokus isu strategis yang dibahas yakni pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Fasilitasi dilakukan dengan koordinasi stakeholder terkait baik provinsi, kab/kota, pusat maupun swasta yang menghasilkan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026.

Selain itu, Biro Administrasi Pembangunan Daerah juga mengeluarkan telaah rekomendasi perubahan SSK OPD sesuai dengan tuisi Biro Adm. Bangda dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah Tahun 2023 (Pasal 83 ayat 1) dimana perubahan SSK dilakukan elalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD dan tetap mempedomani ketentuan pergeseran anggaran.

### **C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Indikator kinerja program persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro** didukung oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diformulasikan dari jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro. Kegiatan administrasi umum perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang fasilitasi pelaksanaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perencanaan, kearsipan dan aset lingkup Biro serta fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pelayanan pimpinan yang sifatnya rutin.

### **D. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Indikator kinerja program persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda** didukung oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diformulasikan dari jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 didukung dengan Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan agenda menyusun Rencana Kerja Setda Tahun 2024, melaksanakan FPD Penyusunan Renja 2024 dan Renstra 2024-2026, Renstra Setda 2024-2026, Renja Perubahan Setda Tahun 2023, melaksanakan fasilitasi konsultasi dan pendampingan perencanaan Biro-

Biro dan Penyusunan RKA-DPA Setda 2024 serta DPPA-P-RKA 2023 lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah melaksanakan agenda Rakor evaluasi pelaksanaan APBD dan capaian kinerja biro-biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah, menyusun LKjIP Tahun 2022 dan draft LKjIP 2023, dan menyusun LKPJ Setda 2022 serta draft LKPJ Setda 2023.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah didukung dengan Anggaran sebesar sebesar Rp Rp.3.803.006.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta enam ribu rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan.

Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Rp 685.806.000</b>	<b>Rp 684.072.450</b>	<b>99,75</b>
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 275.000.000	Rp 273.624.874	99,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 410.806.000	Rp 410.447.576	99,91
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI</b>	<b>Rp 3.117.200.000</b>	<b>Rp 3.114.178.070</b>	<b>99,90</b>

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
	<b>PEMBANGUNAN</b>			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.171.200.000	Rp 2.170.034.810	99,95
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 946.000.000	Rp 944.143.260	99,80

### 3.3 INOVASI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan 2024 kemiskinan 0% di Seluruh Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah diamanatkan tugas tambahan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Jawa Tengah.

Secara substansi RPD Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026 akan melanjutkan penyelesaian beberapa isu strategis, di mana *core* isu strategis adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, tercatat 620.258 penduduk Jawa Tengah di 17 Kabupaten termiskin tergolong desil satu atau kemiskinan ekstrem yaitu: Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemasang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fokus intervensi yang harus dituntaskan adalah percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang diperkirakan masih menyisakan angka sebesar 2,04 persen di Indonesia (Data BPS 2022).

Untuk itu diperlukan pembiayaan alternatif sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada APBN/APBD yang ruang fiskalnya mulai terbatas, Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif menggali sumber dana lain di luar APBD/APBN dengan strategi pembiayaan gotong royong.

Strategi pembiayaan gotong royong adalah strategi percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat miskin dengan dukungan pendanaan secara gotong royong tidak hanya dari APBN dan APBD, tetapi juga disokong oleh dana CSR, BUMN, BUMD, Baznas dan masyarakat filantropi Indonesia.

Adapun inovasi yang dilakukan pada tahun 2023, Biro Administrasi Pembangunan Daerah telah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pihak antara lain Baznas Provinsi Jawa Tengah, PT Astra International, Tbk dan Filantropi Barong Indonesia untuk mendukung intervensi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di berbagai sektor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 102.56% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Program **Capaian Pelaksanaan APBD**, realisasi capaiannya sebesar 100,96% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- b. Indikator Kinerja Program **Capaian Pelaksanaan APBN**, realisasi capaiannya sebesar 104% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- c. Indikator Kinerja Program **Persentase Realisasi Bantuan Keuangan**, realisasi capaiannya sebesar 113,02% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- d. Indikator Kinerja Program **Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.
- e. Indikator Kinerja Program **Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi**, realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.
- f. Indikator Kinerja Program **Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah**, realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.
- g. Indikator Kinerja Program **Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda** realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.



## 4.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya direkomendasikan tetap mempertahankan capaian yang sudah baik namun harus tetap meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin berkembang guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Februari 2024

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199603 1 006